

ARTIKEL

Strategi Keberlanjutan Inovasi Daerah di Kabupaten Pelalawan

Sustainable Regional Innovation Strategy in Pelalawan Regency

OPEN ACCESS

Sitasi: Riady, A., Fajriana, D., & Ritawati, T. (2026). Strategi Keberlanjutan Inovasi Daerah di Kabupaten Pelalawan. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 10(1), 29–41. <https://doi.org/10.21787/mp.10.1.2026.29-41>

Dikirim: 1 April 2026

Diterima: 12 Mei 2026

Diterbitkan: 30 Mei 2026

© Penulis



Artikel ini dilisensikan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa 4.0 Internasional

Kata Kunci:

keberlanjutan, pemerintah daerah, inovasi daerah, indeks inovasi daerah.

Azhar Riady ¹, Deswanisa Fajriana ², Tengku Ritawati ³

^{1,3}Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pelalawan

²Balai Diklat Keuangan Pekanbaru

azharriady97@gmail.com

Abstrak: Inovasi Strategi keberlanjutan inovasi daerah merupakan aspek krusial yang menentukan apakah capaian inovasi dapat dipertahankan secara konsisten dari tahun ke tahun. Selama ini, strategi keberlanjutan inovasi lebih banyak dikaji melalui prasyarat eksternal seperti komitmen kepemimpinan kepala daerah dan ekosistem kebijakan yang kondusif, yang terbukti efektif pada daerah dengan tata kelola yang sudah tertata baik. Namun tidak semua pemerintah daerah berada pada kondisi tersebut: sebagian menghadapi keterbatasan dukungan kepemimpinan serta belum tersedianya regulasi yang mendorong inovasi secara sistematis. Di sisi lain, strategi keberlanjutan inovasi dari sudut pandang BRIDA selaku koordinator inovasi masih jarang menjadi fokus kajian. Penelitian ini hadir sebagai alternatif dengan menganalisis bagaimana BRIDA Kabupaten Pelalawan menjalankan strategi keberlanjutan inovasi dalam merespons dinamika penilaian Indeks Inovasi Daerah (IID) periode 2021-2024. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah batasan rentang waktu kelayakan pelaporan inovasi yang hanya berlaku dua tahun terakhir, sehingga menuntut pembaruan portofolio inovasi secara berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan data yang dikumpulkan melalui dokumentasi laporan IID, dokumen perencanaan strategis, dan data statistik pelaporan inovasi. Temuan menunjukkan bahwa BRIDA Kabupaten Pelalawan menerapkan empat strategi yang saling terintegrasi: analisis proyeksi mandiri berbasis bobot penilaian, perluasan cakupan unit kerja pelapor, pendampingan inovasi, serta pengembangan inovasi yang telah ada. Implementasi strategi-strategi ini berhasil meningkatkan skor IID Kabupaten Pelalawan secara konsisten dari 47,33 pada tahun 2021 menjadi 65,70 pada tahun 2024, mengantarkan Kabupaten Pelalawan meraih predikat sangat inovatif sekaligus mempertahankan peringkat kedua di Provinsi Riau. Penelitian ini memberikan kontribusi praktis sebagai referensi bagi BRIDA di daerah lain dalam merancang strategi keberlanjutan inovasi yang adaptif terhadap dinamika penilaian IID nasional.

Abstract: *The sustainability strategy of regional innovation is a crucial aspect that determines whether innovation achievements can be maintained consistently from year to year. Existing studies have largely examined innovation sustainability through external prerequisites such as leadership commitment from regional heads and a conducive policy ecosystem, which have proven effective in regions with well-established governance. However, not all local governments operate under such conditions: some face limited leadership support and the absence of regulations that systematically encourage innovation. At the same time, innovation sustainability strategies from the perspective of BRIDA as the innovation coordinator remain rarely explored. This study offers an alternative by analyzing how BRIDA of Pelalawan Regency*

Keywords: Sustainability, local government, regional innovation, Regional Innovation Index.

implements innovation sustainability strategies in responding to the dynamics of the Regional Innovation Index (IID) assessment during 2021-2024. One key challenge is the eligibility time limit for innovation reporting, which only covers the most recent two years, requiring continuous renewal of the innovation portfolio. This study employs a qualitative methodology with data collected through documentation of IID reports, strategic planning documents, and innovation reporting statistics. Findings reveal that BRIDA Pelalawan Regency applies four integrated strategies: independent projection analysis based on assessment weights, expansion of reporting work unit coverage, innovation mentoring, and development of existing innovations. Implementation of these strategies successfully increased Pelalawan Regency's IID score consistently from 47.33 in 2021 to 65.70 in 2024, leading Pelalawan Regency to achieve the highly innovative predicate while maintaining second rank in Riau Province. This study provides a practical contribution as a reference for BRIDA in other regions in designing innovation sustainability strategies that are adaptive to the dynamics of national IID assessment.

1. Pendahuluan

Keberadaan inovasi dalam pemerintahan tidak terlepas dari kontribusinya terhadap perwujudan tata kelola yang baik, di mana transparansi, akuntabilitas, dan integritas menjadi elemen inti yang harus dipenuhi (Schnell, 2023). Penelitian empiris di Indonesia menunjukkan bahwa inovasi pemerintah secara signifikan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan mempercepat proses layanan dan meningkatkan partisipasi publik (Wijaya et al., 2024). Hubungan antara inovasi dan integritas sektor publik semakin relevan mengingat persepsi masyarakat terhadap integritas pejabat publik di berbagai negara menunjukkan perlunya penguatan kelembagaan dan penegakan standar etika (OECD, 2025). Dengan demikian, inovasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen teknis untuk meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga sebagai mekanisme strategis untuk memperkuat legitimasi pemerintahan.

Dalam konteks Indonesia, implementasi inovasi di sektor publik telah menunjukkan perkembangan signifikan dalam satu dekade terakhir. Data empiris mengungkapkan pertumbuhan eksponensial jumlah inovasi pemerintah, dari 515 inovasi pada tahun 2014 menjadi 3.478 inovasi pada tahun 2022, menunjukkan bahwa budaya inovasi telah mulai mengakar di berbagai level pemerintahan (Farhan, 2023). Perkembangan ini didorong oleh berbagai inisiatif reformasi birokrasi yang menekankan pentingnya terobosan dalam perbaikan kualitas layanan publik (Citra et al., 2024).

Landasan regulasi yang memperkuat komitmen nasional terhadap inovasi daerah diwujudkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Regulasi ini mendefinisikan inovasi daerah sebagai segala bentuk pembaruan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan meningkatkan kinerja, mempercepat kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat daya saing daerah, sekaligus memberikan kerangka kerja bagi implementasi inovasi yang mendukung pembangunan ekonomi. Temuan empiris menunjukkan bahwa pemerintah daerah dengan tingkat inovasi lebih tinggi memiliki capaian pembangunan dan kinerja layanan publik lebih baik (Hilmawan et al., 2023).

Meskipun pertumbuhan inovasi menunjukkan tren positif, berbagai penelitian menekankan bahwa tantangan utama bukan terletak pada proses adopsi awal, melainkan pada kemampuan pemerintah daerah menjaga keberlangsungannya. Keberlanjutan inovasi sangat dipengaruhi oleh dukungan regulasi, pembiayaan berkelanjutan, kompetensi teknis aparatur, keterlibatan pemangku kepentingan, serta kemampuan inovasi untuk terus diperbarui. Studi menunjukkan bahwa tata kelola

kolaboratif memainkan peran krusial, di mana keterlibatan beragam *stakeholder* melalui struktur pengambilan keputusan lintas institusi menjadi kunci keberhasilan (Zia ud din et al., 2023). Kolaborasi yang efektif memerlukan kesatuan stakeholder, komunikasi reguler, kepercayaan mutual, dan konsensus untuk memastikan inovasi terinternalisasi di berbagai level organisasi pemerintahan. Kajian (Wardani & Apriani, 2023) di Kota Bandung memperkuat perspektif ini dengan menemukan bahwa keberlanjutan inovasi bertumpu pada komitmen kepemimpinan kepala daerah, ekosistem kebijakan yang kondusif, pengembangan kapasitas aparatur, serta penerapan pendekatan *Corporate University (CorpU)*. Strategi-strategi tersebut terbukti efektif pada daerah dengan tata kelola yang sudah tertata baik, namun secara inheren mensyaratkan prasyarat eksternal yang tidak selalu dimiliki setiap daerah: sebagian menghadapi keterbatasan dukungan kepemimpinan serta belum tersedianya regulasi yang mendorong inovasi secara sistematis. Hal ini menunjukkan bahwa strategi keberlanjutan inovasi dari sudut pandang BRIDA selaku koordinator inovasi yang bekerja secara mandiri masih jarang menjadi fokus kajian, sementara tuntutan untuk mempertahankan kinerja inovasi melalui sistem penilaian nasional terus berjalan setiap tahunnya.

Upaya menjaga keberlanjutan inovasi daerah tidak dapat dilepaskan dari sistem evaluasi yang diciptakan melalui mekanisme penilaian nasional. Indeks Inovasi Daerah (IID) oleh Kementerian Dalam Negeri merupakan instrumen utama dalam mengukur serta mengevaluasi penerapan inovasi di tingkat pemerintah daerah setiap tahunnya (Anggraeni et al., 2023). Penilaian IID dilakukan setiap tahun berdasarkan tiga komponen utama: (1) Satuan Pemerintah Daerah (SPD) yang mengukur dukungan kelembagaan terhadap inovasi, (2) Satuan Inovasi Daerah (SID) yang menilai tingkat kematangan inovasi (Budiman et al., 2021). Meskipun secara substansi SPD dan SID adalah pilar utama, pemisahan jumlah inovasi sebagai komponen ketiga dilakukan mengingat adanya perbedaan pencatatan data setiap tahun; di mana jumlah inovasi terkadang terakumulasi dalam SID dan pada tahun lainnya masuk ke dalam SPD. Hasil penilaian menghasilkan skor yang mengategorikan daerah ke dalam lima predikat: sangat inovatif, inovatif, cukup inovatif, kurang inovatif, dan tidak inovatif. Dengan sistem penilaian tahunan ini, konsistensi pelaporan inovasi menjadi krusial bagi pemerintah daerah untuk mempertahankan atau meningkatkan predikat keinovatifannya.

Salah satu tantangan kritis dalam konteks IID adalah keterbatasan periode kelayakan pelaporan yang hanya berlaku untuk dua tahun terakhir. Inovasi yang diterapkan tiga tahun atau lebih sebelum periode penilaian tidak dapat dilaporkan, kecuali mengalami pengembangan signifikan yang memperbarui tahun penerapannya. Mekanisme ini menciptakan tekanan bagi pemerintah daerah untuk terus memperbarui portofolio inovasi yang dapat dilaporkan (Sistrantiani et al., 2025) dan menuntut strategi pengelolaan yang lebih sistematis (Nisa, 2022). Dengan demikian, mekanisme IID secara tidak langsung membentuk perilaku pemerintah daerah dalam mengelola siklus hidup inovasi, menciptakan dinamika antara dorongan berinovasi secara kuantitatif dengan kebutuhan memastikan keberlanjutan dan kualitas inovasi yang telah diimplementasikan.

Di tengah tekanan dinamis penilaian IID tersebut, Kabupaten Pelalawan menghadirkan jawaban empiris yang relevan. Daerah ini berhasil meraih predikat sangat inovatif pada tahun 2024 setelah tiga tahun sebelumnya konsisten berada pada kategori inovatif, dengan peningkatan skor IID yang berlangsung secara bertahap dan terukur; pencapaian tersebut diraih sepenuhnya melalui penyesuaian strategis yang bersumber dari kapasitas internal BRIDA, bukan dari perubahan kepemimpinan maupun pembangunan ekosistem kebijakan baru. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana BRIDA Kabupaten Pelalawan menjalankan strategi

keberlanjutan inovasi dalam merespons dinamika penilaian IID, sebagai referensi bagi BRIDA di daerah lain yang menghadapi keterbatasan kondisi eksternal serupa.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan fenomena kebijakan inovasi daerah secara mendalam berdasarkan kondisi empiris yang terjadi. Pendekatan ini sesuai dengan karakter penelitian yang bertujuan memberikan pemahaman faktual mengenai praktik dan strategi kebijakan organisasi publik, sebagaimana ditegaskan (Lambert & Lambert, 2012) bahwa *qualitative descriptive research* merupakan desain yang cocok untuk memotret fenomena kebijakan dan proses organisasi secara apa adanya. Secara epistemologis, pendekatan ini diperkuat oleh perspektif fenomenologis sebagaimana dikembangkan (Van Manen, 2014), yang memungkinkan peneliti mengungkap makna dan pengalaman yang dialami langsung oleh aktor kebijakan, dalam hal ini aparatur BRIDA, dalam menghadapi dan merespons tekanan perubahan instrumen penilaian IID dari tahun ke tahun. Perspektif ini relevan karena strategi adaptif yang diterapkan BRIDA tidak dapat dipahami sepenuhnya hanya dari angka peningkatan skor; ia mensyaratkan pemahaman terhadap proses interpretasi kebijakan, pengambilan keputusan taktis, dan penyesuaian organisasional yang berlangsung di balik data tersebut. Beranjak dari landasan epistemologis tersebut, desain penelitian menggunakan studi kasus deskriptif dengan Kabupaten Pelalawan sebagai konteks tunggal yang dianalisis, sejalan dengan panduan desain penelitian kualitatif (Creswell & Creswell, 2017) yang menempatkan konteks spesifik sebagai unit pemahaman dalam penelitian kebijakan. Kabupaten Pelalawan dipilih karena menunjukkan pola peningkatan skor Indeks Inovasi Daerah yang konsisten selama periode 2021 hingga 2024 dan memperoleh predikat Sangat Inovatif pada tahun 2024.

Analisis data dilakukan menggunakan *content analysis* dan pemetaan tematik sebagaimana dijelaskan oleh (ÖZDEN, 2024) untuk mengidentifikasi pola, tren, dan fokus strategis secara sistematis. Analisis dilakukan secara deduktif berdasarkan tiga strategi kunci yang dirumuskan oleh pemerintah daerah, yakni perluasan cakupan unit kerja pelapor inovasi, pendampingan inovasi kepada perangkat daerah, dan pengembangan inovasi yang telah ada. Data kuantitatif mengenai jumlah inovasi per tahun dan per klaster dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi pola peningkatan pelaporan inovasi, pergeseran kontribusi antar klaster, dampak perubahan bobot penilaian terhadap strategi pelaporan, serta keterkaitan antara strategi dan capaian skor IID. Hasil analisis disajikan melalui narasi deskriptif yang dilengkapi dengan tabel dan visualisasi grafik untuk memperjelas pola perkembangan inovasi daerah.

Validitas penelitian diperkuat melalui triangulasi sumber dengan membandingkan konsistensi informasi dari data primer BRIDA, dokumen evaluasi Kemendagri, laporan tahunan BRIDA, dan dokumen resmi Kemendagri, sebagaimana direkomendasikan oleh (Nowell et al., 2017). Konfirmasi silang dilakukan antara data inovasi terlapor dengan skor IID pada masing-masing tahun untuk memastikan kredibilitas temuan. Meskipun peneliti memiliki keterlibatan langsung dalam proses pendampingan inovasi, potensi bias diminimalkan dengan penggunaan data numerik objektif serta perbandingan dokumen independen dari Kemendagri.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Perkembangan Inovasi Kabupaten Pelalawan

Berdasarkan data rekapitulasi skor IID, Kabupaten Pelalawan mencatatkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2021 hingga 2024. Pada tiga tahun pertama, nilai indeks terus meningkat dari 47,33 pada tahun 2021 (Kepmendagri No. 002.6-5848 Tahun 2021), menjadi 53,39 pada tahun 2022 (Kepmendagri No. 400.10.11-6301.A Tahun 2022), dan 58,21 pada tahun 2023 (Kepmendagri No. 400.10.11-6287 Tahun 2023), meskipun capaian tersebut masih menempatkan Kabupaten Pelalawan pada predikat inovatif. Upaya perbaikan berkelanjutan membuahkan hasil signifikan pada tahun 2024 dengan skor IID mencapai 65,70 (Kepmendagri No. 400.10.11-4898 Tahun 2024), mengantarkan Kabupaten Pelalawan naik kelas menjadi sangat inovatif. Konsistensi kenaikan tahunan ini menegaskan bahwa manajemen inovasi di Kabupaten Pelalawan berjalan pada jalur positif dan terus mengalami penyempurnaan. Perkembangan skor selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan Skor Indeks Inovasi Daerah di Provinsi Riau 2021-2024.

No	Kabupaten	Skor IID			
		2021	2022	2023	2024
1	Kabupaten Indragiri Hilir	62,40	67,63	63,72	62,46
2	Kota Pekanbaru	60,10	70,57	62,86	68,34
3	Kabupaten Pelalawan	47,30	53,39	58,21	65,70
4	Kabupaten Kampar	42,70	54,49	50,62	58,05
5	Kabupaten Kepulauan Meranti	35,50	40,95	48,97	27,15
6	Kabupaten Kuantan Singingi	32,00	48,42	47,67	49,09
7	Kabupaten Rokan Hulu	47,60	50,36	46,80	47,75
8	Kabupaten Indragiri Hulu	41,40	40,89	44,15	51,25
9	Kabupaten Bengkalis	48,30	44,17	42,59	37,78
10	Kota Dumai	20,50	41,03	42,38	54,70
11	Kabupaten Siak	21,00	44,70	37,12	56,87
12	Kabupaten Rokan Hilir	17,80	30,51	36,87	38,63

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) tentang Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021-2024.

Jika disandingkan dengan kabupaten dan kota lain di Provinsi Riau pada tahun 2024, capaian skor 65,70 tersebut menempatkan Kabupaten Pelalawan pada peringkat kedua tertinggi. Posisi ini berada tepat di bawah Kota Pekanbaru yang mencatatkan skor 68,34, namun lebih unggul dibandingkan Kabupaten Indragiri Hilir dengan skor 62,46 dan Kabupaten Kampar dengan skor 58,05. Dari sisi pola pergerakan data selama empat tahun terakhir, Kabupaten Pelalawan bersama Kota Dumai dan Kabupaten Rokan Hilir merupakan daerah yang grafiknya konsisten naik setiap tahun. Hal ini berbeda dengan mayoritas daerah lain seperti Kabupaten Indragiri Hilir, Kampar, Kuantan Singingi, Rokan Hulu, dan Siak yang tren nilainya cenderung fluktuatif, serta berbeda dengan Kabupaten Bengkalis yang justru mengalami tren penurunan skor dari tahun 2021 hingga 2024. Posisi strategis dan tren positif ini menunjukkan bahwa Kabupaten Pelalawan memiliki daya saing yang kuat dalam ekosistem inovasi daerah di tingkat provinsi.

3.2. Strategi Keberlanjutan Inovasi Kabupaten Pelalawan

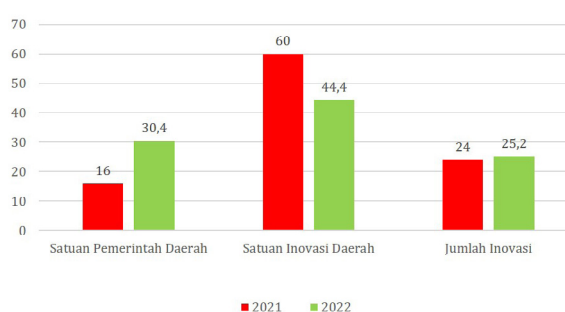
Pencapaian Kabupaten Pelalawan yang berhasil meraih predikat sangat inovatif pada tahun 2024 setelah tiga tahun berturut-turut berada pada kategori inovatif bukanlah hasil dari proses tanpa tantangan. Transformasi ini lahir dari kemampuan pemerintah daerah untuk merespons secara adaptif terhadap dinamika perubahan kriteria

penilaian IID yang terjadi dari tahun ke tahun. Setiap perubahan bobot penilaian menuntut penyesuaian strategi yang signifikan dalam pengelolaan inovasi daerah, memaksa pemerintah daerah untuk terus berinovasi dalam pengelolaan inovasi itu sendiri dan menciptakan siklus pembelajaran organisasi yang berkelanjutan.

Keberhasilan Kabupaten Pelalawan menunjukkan bahwa pengelolaan inovasi daerah yang efektif memerlukan pendekatan sistematis yang mengintegrasikan analisis strategis, perluasan partisipasi, dan penguatan kapasitas organisasi. Pendekatan ini tidak hanya reaktif terhadap perubahan kebijakan, tetapi juga proaktif dalam membangun fondasi keberlanjutan inovasi jangka panjang. Pengalaman ini membuktikan bahwa kesuksesan dalam penilaian IID bukan semata tentang menghasilkan banyak inovasi, tetapi tentang membangun ekosistem inovasi yang tangguh dan adaptif. Berikut strategi kunci yang diimplementasikan Kabupaten Pelalawan dalam menjaga keberlanjutan inovasi daerah.

3.2.1. Analisis perhitungan mandiri

Implementasi strategi keberlanjutan inovasi di Kabupaten Pelalawan diawali dengan pelaksanaan analisis perhitungan mandiri pada tahun 2022. Inisiatif ini merupakan respons terhadap tantangan teknis yang dihadapi pemerintah daerah, di mana perubahan petunjuk teknis penilaian IID yang terjadi hampir setiap tahun menuntut penyesuaian format pelaporan dan mekanisme penginputan data secara berkelanjutan (Wedayania et al., 2026). Salah satu perubahan yang paling signifikan terjadi pada tahun 2022, yakni perubahan komposisi bobot penilaian IID. Berdasarkan Pedoman Umum Penilaian IGA dan Penjelasan Teknis Indikator IID yang diterbitkan Pusat Litbang Inovasi Daerah Kementerian Dalam Negeri tahun 2021, bobot Satuan Inovasi Daerah (SID) sebesar 60 persen dan bobot jumlah inovasi sebesar 16 persen. Pada tahun 2022, sesuai pedoman yang diperbarui oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, koefisien jumlah inovasi meningkat dari 0,2 menjadi 0,38, sehingga bobotnya naik menjadi 30,4 persen atau hampir dua kali lipat, sementara bobot SID turun menjadi 44,4 persen. Pergeseran ini menandai perubahan paradigma dalam penilaian IID menuju keseimbangan yang lebih proporsional antara kuantitas dan kualitas, serta menuntut pemerintah daerah melakukan analisis strategis untuk mengoptimalkan capaian sesuai struktur bobot yang baru.



Gambar 1. Perbandingan Komposisi bobot Penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021 dan 2022.

Sumber: Puslitbang Inovasi Daerah Kemendagri (2021) dan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (2022).

Selain tantangan perubahan bobot, Kabupaten Pelalawan juga menghadapi keterbatasan periode kelayakan pelaporan. Ketentuan IID mensyaratkan bahwa hanya inovasi dengan tahun penerapan dalam rentang dua tahun terakhir yang dapat dilaporkan. Proses inventarisasi untuk IID 2022 menghasilkan temuan yang mengkhawatirkan: hanya 15 inovasi yang memenuhi kriteria, turun drastis dari 46 inovasi pada IID 2021. Penurunan ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu sebagian besar inovasi periode sebelumnya telah melampaui batas kelayakan, sementara sejumlah inovasi yang masih memenuhi kriteria tahun penerapan sudah tidak berjalan

di lapangan. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya tingkat kematangan mayoritas inovasi yang tersisa, yang berdampak langsung pada proyeksi skor IID.

Menghadapi kondisi tersebut, BRIDA Kabupaten Pelalawan melakukan simulasi perhitungan untuk mengidentifikasi strategi optimal. Proyeksi menunjukkan bahwa melaporkan 10 inovasi dengan kematangan beragam menghasilkan skor yang relatif sama dengan melaporkan 7 inovasi berkematangan tertinggi. Temuan ini menegaskan bahwa meskipun bobot jumlah inovasi meningkat menjadi 30,4 persen, dominasi bobot kematangan pada 44,4 persen menjadikan fokus pada peningkatan kualitas tetap lebih efektif dalam kondisi keterbatasan sumber daya. Strategi yang paling rasional adalah mengalokasikan sumber daya untuk meningkatkan kematangan sebagian inovasi hingga level tertinggi, sejalan dengan temuan (Teirlinck & Spithoven, 2023) yang mengadvokasi pengukuran berbasis efisiensi untuk mengarahkan alokasi sumber daya terbatas pada intervensi yang lebih berdampak tinggi.



Gambar 2. Grafik Perbandingan Skor IID Kab Pelalawan dengan Jumlah inovasi yang dilaporkan Pada Penilaian IID Tahun 2021-2024.

Sumber: Data diolah dari Laporan Tahunan BALITBANGDA Kabupaten Pelalawan (2021-2023) dan BRIDA Pelalawan (2024).

Validitas temuan analisis perhitungan mandiri ini terbukti dari hasil penilaian IID 2022 yang menunjukkan peningkatan skor dibandingkan tahun 2021, meskipun jumlah inovasi yang dilaporkan turun dari 46 menjadi 7. Analisis ini berfungsi sebagai mekanisme *capacity building* internal yang memungkinkan pemerintah daerah memahami dinamika penilaian IID serta mengidentifikasi strategi optimal, sehingga sejalan dengan konsep *knowledge-seeking* dalam peningkatan kapasitas inovasi. Temuan ini sekaligus menjadi dasar empiris bagi penyusunan strategi keberlanjutan inovasi pada tahun-tahun berikutnya, khususnya saat terjadi perubahan bobot penilaian IID pada 2023. (Boly et al., 2022) memperkuat argumen ini melalui *framework* evaluasi kapasitas inovasi yang menekankan kematangan proses daripada sekadar jumlah *output*. Pengalaman tahun 2022 membuktikan bahwa fleksibilitas strategis dan kemampuan analisis menjadi kunci dalam merespons dinamika kebijakan penilaian inovasi di tingkat nasional.

3.2.2. Perluasan Cakupan Unit Kerja

Strategi kedua adalah perluasan cakupan unit kerja pelapor inovasi, sebagai respons terhadap perubahan mekanisme penilaian IID 2023 yang menetapkan rata-rata skor kematangan dihitung berdasarkan minimal 10 inovasi. Mekanisme ini menjadikan strategi tahun 2022 yang hanya melaporkan 7 inovasi berkematangan tinggi menjadi kurang optimal, sehingga pemerintah daerah perlu memenuhi minimal 10 inovasi dengan kematangan yang memadai.

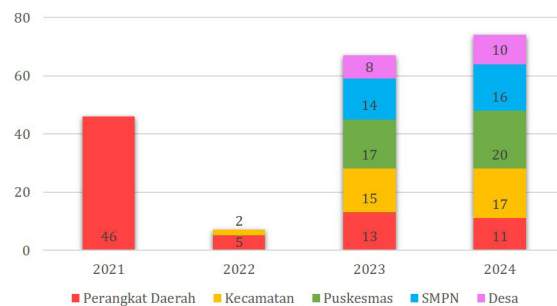
Tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan basis inovasi dari sumber konvensional. Dari 15 inovasi yang memenuhi kriteria tahun penerapan, hanya 7 yang berhasil dikembangkan hingga kematangan tertinggi dan dilaporkan pada 2022. Upaya menambah inovasi dari perangkat daerah dan kecamatan menghadapi kendala

kapasitas, sehingga diperlukan pendekatan baru yang memperluas sumber inovasi tanpa membebani unit kerja yang telah berkontribusi.

Merespons kondisi tersebut, Kabupaten Pelalawan memperluas cakupan unit kerja pelapor dengan menambahkan tiga kategori baru, yakni desa, SMPN, dan Puskesmas, di samping perangkat daerah dan kecamatan yang telah menjadi sumber inovasi sejak 2021. Perluasan ini menciptakan representasi yang lebih komprehensif dari berbagai domain pelayanan publik daerah.

Strategi ini didasarkan pada bukti empiris yang menunjukkan bahwa inovasi tersebar luas di unit-unit pelayanan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Di tingkat desa, inovasi pelayanan publik terbukti efektif meningkatkan kualitas layanan, seperti program Lebu Digital (Azzahra et al., 2025) dan model *Smart* Kampung Banyuwangi yang mengintegrasikan teknologi digital dalam pelayanan desa (Saleh et al., 2022). Di sektor kesehatan, puskesmas menunjukkan kapasitas inovatif melalui peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak (Rafida Djafar, 2023) serta inovasi pelayanan berkelanjutan (Rafida Djafar, 2023), serta inovasi pelayanan kesehatan yang berkelanjutan di tingkat pemerintah daerah (Pratiwi et al., 2024). Di sektor pendidikan, sekolah menengah pertama membuktikan potensinya melalui pengembangan sistem monitoring absensi dan pencatatan pelanggaran siswa secara digital berbasis web (Faid et al., 2021), pencatatan pelanggaran siswa secara digital berbasis web (Putra et al., 2025).

Implementasi strategi perluasan cakupan menunjukkan hasil yang signifikan dalam peningkatan jumlah inovasi yang dilaporkan. Gambar 1 menunjukkan perbandingan jumlah inovasi yang dilaporkan sebelum dan sesudah implementasi perluasan cakupan pelapor. Pada tahun 2021, dengan hanya dua kategori pelapor yang terdiri dari perangkat daerah dan kecamatan, Kabupaten Pelalawan melaporkan 46 inovasi. Namun angka ini menurun drastis menjadi hanya 7 inovasi pada tahun 2022 akibat banyaknya inovasi yang tidak dapat dilanjutkan dan perubahan strategi fokus pada kematangan. Setelah implementasi perluasan cakupan pada tahun 2023, jumlah inovasi yang dilaporkan meningkat menjadi 67 inovasi, dan terus meningkat menjadi 74 inovasi pada tahun 2024. Peningkatan jumlah inovasi ini tidak hanya memenuhi tuntutan kuantitatif penilaian IID dan syarat minimal 10 inovasi yang ditetapkan, tetapi juga menunjukkan keberhasilan strategi dalam mengidentifikasi dan memobilisasi potensi inovatif yang tersebar di berbagai level pemerintahan. Lebih jauh, tren peningkatan dari tahun 2023 ke 2024 mengindikasikan bahwa strategi perluasan cakupan tidak hanya efektif dalam jangka pendek, tetapi juga menciptakan momentum positif yang berkelanjutan dalam ekosistem inovasi daerah.



Gambar 3. Grafik Jumlah inovasi yang dilaporkan pada penilaian IID 2021-2024 Berdasarkan Kategori unit kerja.

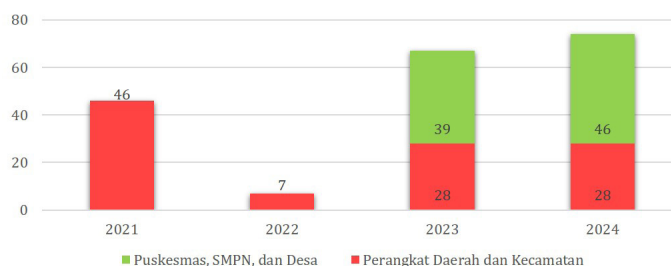
Sumber: Data diolah dari Laporan Tahunan BALITBANGDA Kabupaten Pelalawan (2021-2023) dan BRIDA Pelalawan (2024).

Analisis lebih lanjut terhadap komposisi sumber inovasi menunjukkan kontribusi signifikan dari tiga kategori baru. Dari 67 inovasi yang dilaporkan pada tahun 2023, dua kategori awal (perangkat daerah dan kecamatan) menyumbang 28 inovasi,

sementara tiga kategori baru berkontribusi 39 inovasi atau sekitar 58 persen dari total inovasi. Pada tahun 2024, kontribusi tiga kategori baru meningkat menjadi 46 inovasi dari total 74 inovasi yang dilaporkan, sementara dua kategori awal tetap menyumbang 28 inovasi. Pola ini menunjukkan bahwa penambahan tiga kategori baru bukan hanya bersifat *supplementary*, tetapi telah menjadi kontributor utama dalam ekosistem inovasi daerah. Stabilitas kontribusi dua kategori awal mengindikasikan bahwa kapasitas inovasi dari perangkat daerah dan kecamatan telah mencapai tingkat optimal, sehingga peningkatan kuantitas inovasi secara berkelanjutan memerlukan perluasan basis pelapor.

Gambar 2 mengilustrasikan perbandingan kontribusi antara dua kategori awal dengan tiga kategori baru pada tahun 2023 dan 2024. Visualisasi ini menunjukkan bahwa kontribusi tiga kategori baru tidak hanya signifikan secara kuantitatif, tetapi bahkan melebihi kontribusi dari perangkat daerah dan kecamatan.

Dengan melibatkan desa, sekolah, dan puskesmas sebagai unit layanan frontline, Kabupaten Pelalawan tidak hanya memperluas basis sumber inovasi, tetapi juga membangun budaya inovasi yang lebih merata. Demokratisasi proses inovasi ini penting dalam pembangunan kapasitas kelembagaan jangka panjang, di mana inovasi menjadi orientasi bersama yang terinternalisasi dalam seluruh struktur pemerintahan daerah.



Gambar 4. Grafik Perbandingan Jumlah Inovasi yang dilaporkan Perangkat daerah dan kecamatan dibandingkan Unit kerja lainnya tahun 2021-2024.

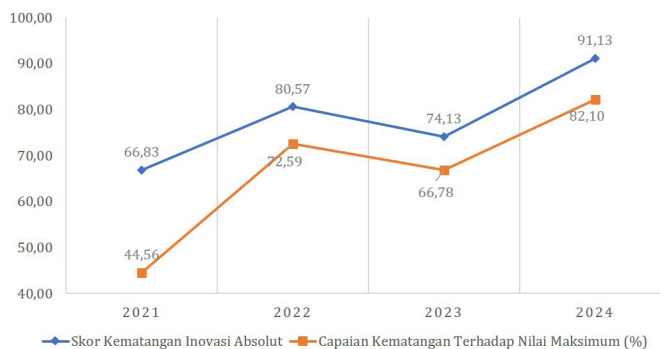
Sumber: Data diolah dari Laporan Tahunan BALITBANGDA Kabupaten Pelalawan (2021-2023) dan BRIDA Pelalawan (2024).

3.2.3. Pendampingan Inovasi

Kegiatan pendampingan inovasi merupakan strategi fundamental dalam membangun keberlanjutan inovasi daerah di Kabupaten Pelalawan, dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai konsep, implementasi, dan pelaporan inovasi kepada seluruh unit kerja yang terlibat (Adhania, 2023) menegaskan bahwa pelaksanaan inovasi daerah kerap tidak optimal karena berbagai pihak belum memiliki pemahaman yang selaras, sehingga upaya yang dilakukan cenderung tidak terkoordinasi. Pendampingan hadir sebagai mekanisme untuk membangun keselarasan tersebut sekaligus membantu unit kerja mengenali dan memformalisasikan praktik yang selama ini telah dijalankan namun belum disadari sebagai inovasi yang layak dilaporkan.

Dampak pendampingan terhadap kualitas inovasi dapat diamati melalui perkembangan kematangan inovasi dalam indikator Satuan Inovasi Daerah (SID). **Gambar 5** menunjukkan skor kematangan (garis biru) dan persentase capaian terhadap nilai maksimal (garis oranye). Skor kematangan meningkat dari 66,83 poin pada 2021 menjadi 80,57 poin pada 2022, menurun menjadi 74,13 poin pada 2023, sebelum melonjak signifikan mencapai 91,13 poin pada 2024. Pola serupa terlihat pada persentase capaian: dari 44,56 persen (2021), naik ke 72,59 persen (2022), turun ke 66,78 persen (2023), lalu mencapai puncak 82,10 persen (2024). Perlu dicatat bahwa nilai maksimal kematangan berubah dari 150 menjadi 111 pada 2022, sehingga persentase capaian menjadi indikator yang lebih relevan untuk perbandingan

antartahun. Penurunan pada 2023 merupakan periode penyesuaian ketika inovasi-inovasi baru dari desa, SMPN, dan Puskesmas masih berada pada tingkat kematangan awal. Rebound kuat pada 2024 mengindikasikan bahwa pendampingan berhasil mengembangkan inovasi-inovasi tersebut menuju kematangan yang lebih tinggi, sekaligus menegaskan efektivitasnya dalam meningkatkan kualitas inovasi secara berkelanjutan.



Gambar 5. Tren Perkembangan Skor Kematangan Inovasi dan Capaian terhadap Nilai Maksimum (2021–2024).

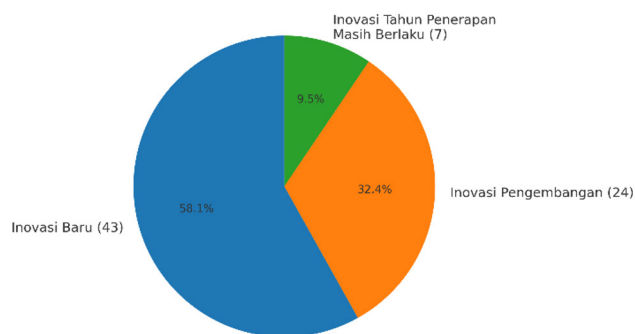
Sumber: Data diolah dari Laporan Tahunan BALITBANGDA Kabupaten Pelalawan (2021–2023) dan BRIDA Pelalawan (2024).

Dari dimensi kuantitas inovasi, bukti empiris menunjukkan bahwa hampir keseluruhan inovasi yang dilaporkan pada tahun 2022 dan 2023 merupakan inovasi baru yang sebelumnya tidak teridentifikasi. Peningkatan ini tidak hanya disebabkan oleh penambahan kategori pelapor, tetapi juga oleh meningkatnya kesadaran unit kerja mengenai potensi inovatif dari kegiatan yang mereka laksanakan. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa implementasi program penguatan inovasi daerah dapat meningkatkan kemampuan dan keahlian di bidang inovasi (Citra et al., 2024). Dengan demikian, pendampingan berdampak tidak hanya pada peningkatan kuantitas inovasi yang dilaporkan, tetapi juga pada pengembangan kematangan dan keberlanjutan implementasi inovasi.

3.2.4. Pengembangan Inovasi yang Sudah Ada

Keberhasilan tiga strategi sebelumnya telah meningkatkan kuantitas dan kualitas inovasi yang dilaporkan, namun ketergantungan pada penciptaan inovasi baru setiap tahun menghadapi tantangan keberlanjutan jangka panjang. Oleh karena itu, pendampingan BRIDA tidak hanya berfokus pada inovasi baru, tetapi juga pada pengembangan inovasi yang telah ada. Pendekatan ini didasarkan pada pemahaman bahwa keberlanjutan inovasi dapat diwujudkan melalui pembaruan inovasi yang sebelumnya telah diterapkan (Wardani & Apriani, 2023), sehingga lebih berkelanjutan sekaligus lebih efisien dari segi alokasi anggaran. Dari perspektif penilaian IID, inovasi yang dikembangkan secara signifikan dapat dilaporkan kembali dengan tahun penerapan baru sehingga memenuhi kriteria kelayakan pelaporan.

Data pelaporan inovasi tahun 2024 mencerminkan pergeseran strategis ini. Dari total 74 inovasi yang dilaporkan, 43 merupakan inovasi baru, 24 hasil pengembangan dari inovasi sebelumnya, dan 7 inovasi dengan tahun penerapan yang masih berlaku. Proporsi inovasi pengembangan yang mencapai 32 persen menunjukkan bahwa Kabupaten Pelalawan mulai mengarah pada strategi pengembangan inovasi eksisting, membuka peluang untuk lebih menekankan pengembangan inovasi yang telah terbukti efektif pada periode berikutnya.



Gambar 6. Komposisi Inovasi yang dilaporkan pada penilaian IID 2024 berdasarkan status.

Sumber: Laporan Akhir Kegiatan Pengembangan Inovasi Dan Teknologi Kabupaten Pelalawan Tahun 2024.

Melalui pendekatan ini, BRIDA memfasilitasi unit kerja untuk mengidentifikasi aspek inovasi yang dapat disempurnakan sehingga memenuhi syarat dilaporkan kembali. Sejalan dengan temuan Sari dan Pratiwi (2021), pengembangan inovasi dapat berjalan secara bertahap ketika didukung komitmen kelembagaan dan sistem pendampingan yang terstruktur. Dengan demikian, strategi ini bukan sekadar instrumen pemenuhan tuntutan administratif IID, melainkan mekanisme untuk membangun budaya inovasi berkelanjutan yang berorientasi pada peningkatan kinerja pemerintahan.

4. Kesimpulan

Keberlanjutan inovasi daerah di Kabupaten Pelalawan berhasil dibangun melalui empat strategi terintegrasi yang adaptif terhadap dinamika penilaian Indeks Inovasi Daerah. Analisis perhitungan mandiri memungkinkan optimalisasi alokasi sumber daya sesuai komposisi bobot penilaian dan memberikan landasan strategis berbasis data, terbukti efektif pada tahun 2022 ketika peningkatan skor tercapai meskipun hanya melaporkan tujuh inovasi. Perluasan cakupan unit kerja pelapor dari dua menjadi lima kategori memperluas basis sumber inovasi dan membuka partisipasi yang lebih inklusif, menghasilkan kontribusi signifikan dengan tiga kategori baru menyumbang 58 persen dari total inovasi pada tahun 2023. Pendampingan inovasi mentransformasi perspektif aparatur dan mengidentifikasi praktik inovatif yang sebelumnya tidak terdeteksi, memastikan perluasan partisipasi tersebut didukung pemahaman yang memadai. Pengembangan inovasi eksisting melengkapi ketiganya dengan memastikan efisiensi sumber daya dan keberlanjutan dampak inovasi terhadap peningkatan pelayanan publik.

Implementasi keempat strategi ini meningkatkan skor Indeks Inovasi Daerah dari 47,33 pada tahun 2021 menjadi 65,70 pada tahun 2024, mengantarkan predikat sangat inovatif dan mempertahankan posisi kedua di Provinsi Riau. Konsistensi tren peningkatan membuktikan bahwa pengelolaan inovasi yang efektif memerlukan pendekatan sistematis yang mengintegrasikan analisis strategis berbasis data, perluasan partisipasi inklusif, penguatan kapasitas organisasi, dan kontinuitas pengembangan inovasi.

Temuan ini membuktikan bahwa adaptabilitas terhadap dinamika penilaian, kemampuan analisis strategis, dan komitmen membangun kapasitas kelembagaan merupakan faktor kunci keberlanjutan inovasi yang sepenuhnya dapat dikelola dari dalam organisasi. BRIDA Kabupaten Pelalawan menunjukkan bahwa dengan strategi yang adaptif dari dalam, peningkatan kinerja IID yang konsisten tetap dapat dicapai, sekaligus menghadirkan jalur alternatif yang dapat direplikasi oleh BRIDA di daerah lain yang menghadapi keterbatasan kondisi eksternal serupa.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan. Pertama, desain studi kasus tunggal membatasi generalisasi temuan ke daerah lain dengan karakteristik kelembagaan, kapasitas fiskal, dan konteks sosio-politik yang berbeda. Kedua, penelitian ini belum mengukur dampak substantif inovasi terhadap kualitas pelayanan publik secara langsung, melainkan mengevaluasi strategi dalam konteks penilaian IID. Ketiga, strategi analisis proyeksi mandiri mensyaratkan kemampuan teknis aparatur dalam memetakan bobot penilaian dan memproyeksikan skor secara kalkulatif, sehingga replikasinya di daerah lain bergantung pada ketersediaan SDM dengan kompetensi analitis tersebut. Penelitian mendatang disarankan melakukan studi komparatif lintas daerah untuk menguji replikabilitas strategi ini, serta mengkaji dampak nyata inovasi terhadap kualitas layanan publik sebagai ukuran keberlanjutan yang melampaui angka indeks.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Pelalawan atas dukungan, fasilitasi, dan penyediaan data yang memungkinkan kajian ini terlaksana hingga tersusunnya artikel ini. Apresiasi juga penulis sampaikan kepada Deswanisa Fajriana atas kontribusi dalam diskusi substansi, penajaman analisis, dan masukan metodologis serta kepada Tengku Ritawati atas saran perbaikan yang konstruktif selama proses penyusunan artikel.

Referensi

- Adhania, D. (2023). Tren Penelitian Innovative Government Dan Inovasi Pemerintah Di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau: Mix Methods Bibliometric Analysis. 1–9.
- Anggraeni, H. N., Nurliawati, N., Sufianti, E., & Taryono, O. (2023). Collaborative Strategies in Efforts to Increase the Innovation Index in Cimahi City Government. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 20(1), 11–28. <https://doi.org/10.31113/jia.v20i1.891>
- Azzahra, S., Putri, A. R. C., & Permana, I. (2025). The Effectiveness of Village Government Service in the Lebu Digital Program. *Indonesian Journal of Advanced Research*, 4(7 SE-Articles), 1091–1102. <https://doi.org/10.55927/ijar.v4i7.15013>
- Boly, V., Enjolras, M., Severine Husson, Morel, L., Dupont, L., & Benis, L. (2022). Innovation Capacity of City Administrations: A Best Practices Approach. *Journal of Innovation Economics*, 2, 169-198 VO – 0. <https://doi.org/None>
- Budiman, S., Kurniadi, D., Matridi, R. A., Jenawi, B., & Junriana, J. (2021). Analisa Pemetaan Hasil Inovasi Daerah Kabupaten Bintan Pada Penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2020. *Indonesian Governance Journal : Kajian Politik-Pemerintahan*, 4(2), 112–126. <https://doi.org/10.24905/igj.v4i2.1839>
- Citra, N. P., Agus Heruanto Hadna, & Achmad Djunaedi. (2024). Perkembangan Pengelolaan Inovasi Daerah: Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2017-2022. *Jurnal Administrasi Publik*, 20(1), 21–50. <https://doi.org/10.52316/jap.v20i1.252>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE Publications. <https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=335ZDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT16>
- Faid, M., Sa'id, M., Alwi, B., Oktavianti, S., & Supyan, M. (2021). Pendampingan Sistem Monitoring Absensi dan Pelanggaran Siswa Berbasis WEB dan BOT Telegram. *GUYUB: Journal of Community Engagement*, 2(1), 141–156. <https://doi.org/10.33650/guyub.v2i1.2090>
- Farhan, A. (2023). Inovasi Pelayanan Publik pada Pemerintah Daerah di Indonesia. *Matra Pembaruan*, 7(2), 111–123. <https://doi.org/10.21787/mp.7.2.2023.111-123>
- Hilmawan, R., Aprianti, Y., Yudaruddin, R., Anggraini Bintoro, R. F., Suharsono, Fitrianto, Y., & Wahyuningsih, N. (2023). Public sector innovation in local government and its impact on development outcomes: Empirical evidence in Indonesia. *Heliyon*, 9(12). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e22833>
- Lambert, V. a., & Lambert, C. E. (2012). Qualitative Descriptive Research: An Acceptable Design. *Pacific Rim International Journal of Nursing Research*, 16(4), 255–256. <http://antisipam.kmutt.ac.th/index.php/PRIJNR/article/download/5805/5064>
- Maninggar, N., Kusharsanto, Z. S., Suhandoyo, S., & Maulidya, D. (2023). Model Pengukuran Implementasi Konsep Sistem Inovasi Daerah di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota; Vol 19, No 1 (2023): JPWK Volume 19 No. 1 March 2023DO - 10.14710/Pwk.V19i1.44002*. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/pwk/article/view/44002%3B>

- Nisa, L. S. (2022). Pelaksanaan Sistem Inovasi di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 17(1), 107–120. <https://doi.org/10.47441/jkp.v17i1.274>
- Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic Analysis: Striving to Meet the Trustworthiness Criteria. *International Journal of Qualitative Methods*, 16(1). <https://doi.org/10.1177/1609406917733847>
- OECD. (2025). *Government at a Glance 2025: Size of public procurement*. https://www.oecd.org/en/publications/2025/06/government-at-a-glance-2025_70e14c6c/full-report/size-of-public-procurement_6979cd47.html
- ÖZDEN, M. (2024). Content and Thematic Analysis Techniques in Qualitative Research: Purpose, Process and Features. *Qualitative Inquiry in Education: Theory & Practice*, 2(1 SE-Review Article), 64–81. <https://doi.org/10.59455/qietp.20>
- Pratiwi, Amalia, S., Wahyuadianto, A., Masrully, & Nugroho, C. S. (2024). Continuities of Public Service Innovations (PSIs) in Indonesia's Local Governments' Health Services: Whose Initiative Has a Higher Success Rate? *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 27(3), 243–259. <https://doi.org/10.22146/JSP.78742>
- Putra, Y. A., Sutami, S., & Haryadi, H. (2025). Rancang Bangun Pencatatan Pelanggaran Siswa Berbasis WEB Pada SMA Negeri 1 Kuala Pembuang. *Jurnal Sains Komputer Dan Teknologi Informasi*, 7(2), 77–82. <https://doi.org/10.33084/jsakti.v7i2.9599>
- Rafida Djafar, I. (2023). Innovations to Improve the Quality of Maternal and Child Health Services in Bantaeng Regency. *KnE Social Sciences*, 8(17 SE-Articles), 415–428. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i17.14137>
- Saleh, C., Ibad, S., Suryadi, & Suryono, A. (2022). ANALYSIS OF PUBLIC SERVICES INNOVATION SMART KAMPUNG BANYUWANGI MODEL IN THE PERSPECTIVE OF PUBLIC SERVICE MANAGEMENT. X(3), 1–12.
- Schnell, S. (2023). To know is to act? Revisiting the impact of government transparency on corruption. *Public Administration and Development*, 43(5), 355–367. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/pad.2029>
- Sistrantiani, I., Ngarawula, B., & Ndung, Y. (2025). Regional Innovation Index in Malang District. *International Journal of Scientific and Academic Research*, 05(04), 09–16. <https://doi.org/10.54756/ijisar.2025.4.2>
- Teirlinck, P., & Spithoven, A. (2023). Improving the Regional Innovation Scoreboard for policy: how about innovation efficiency? *Science and Public Policy*, 50(6), 1001–1017. <https://doi.org/10.1093/scipol/scad043>
- Van Manen, M. (2014). *Phenomenology of Practice: Meaning-Giving Methods in Phenomenological Research and Writing* (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315422657>
- Wardani, D. K., & Apriani, T. (2023). Strategi Keberlanjutan Inovasi Daerah di Kota Bandung Strategy of Regional Innovation Sustainability in Bandung. 7, 125–135.
- Wedayania, N. L. M., Marta, A., & Suryandari, K. A. (2026). Implementasi Satuan Inovasi Daerah dalam Peningkatan Indeks Inovasi Daerah. 1(2), 69–77.
- Wijaya, S., Alfitri, Thamrin, M. H., & Salya, D. H. (2024). The Impact of Electronic Government Policy on Transparency and Accountability in Public Services. *International Journal of Science and Society*, 6(2), 411–421. <https://doi.org/10.54783/ijsoc.v6i2.1157>
- Zia ud din, M., Yuan yuan, X., Khan, N. U., & Han, H. (2023). Linking local collaborative governance and public service delivery: mediating role of institutional capacity building. *Humanities and Social Sciences Communications*, 10(1), 906. <https://doi.org/10.1057/s41599-023-02421-3>